

# Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Dampaknya Pada Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Riau

Irwan Saputra<sup>a</sup>, Bambang Supeno<sup>a\*</sup>, Jeni Wardi<sup>a</sup>

<sup>a</sup> Magister Manajemen, Pascasarjana, Universitas Lancang Kuning, Indonesia.

---

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan dampaknya terhadap Tingkat Kemiskinan pada 12 daerah Kabupaten / Kota di Provinsi Riau tahun 2016-2020. Penelitian dilakukan selama 6 bulan, dari bulan Juni sampai Desember 2022. Objek penelitian ini adalah 12 daerah Kabupaten / Kota di Provinsi Riau, populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 12 daerah Kabupaten / Kota di Provinsi Riau. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh berdasarkan dokumentasi hasil publikasi BPS (Badan Pusat Statistik) untuk data Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan, sedangkan data Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Belanja Modal. Alat analisis yang digunakan adalah Analisis Jalur dengan menggunakan metode Parsial Least Square (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Belanja Modal (BM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB), dan Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan (PK). Diharapkan penelitian ini dapat menambah khasanah pengembangan ilmu manajemen keuangan baik dalam kajian empiris maupun teoritis Bagi akademisi dan mahasiswa. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi khususnya yang berkaitan dengan analisis tentang PAD dan Belanja Modal pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan serta dampaknya terhadap Tingkat Kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.

---

## ARTIKEL HISTORI

Received 3 Januari 2023  
Revised 12 Mei 2023  
Accepted 31 Mei 2023

---

## KATA KUNCI

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal (BM), Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) dan Tingkat Kemiskinan (TK)

---

## Pendahuluan

Adanya perubahan dalam pola pengelolaan keuangan telah menyebabkan pergeseran dari sentralisasi pemerintah pusat ke desentralisasi pemerintah daerah yang akhirnya mengakibatkan transformasi dari pemerintah daerah yang terkontrol menjadi daerah otonom. Perubahan tersebut dicanangkan dengan lahirnya UU No. 22 Tahun 1999 yang direvisi pada tahun 2015 menjadi UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. desentralisasi, Pemerintah daerah saat ini memiliki motivasi yang kuat untuk membuat, memperdebatkan, dan menerapkan kebijakan dan inisiatif pembangunan yang dapat disesuaikan secara khusus dengan kebutuhan daerah.

Desentralisasi diantisipasi untuk menawarkan dua keuntungan nyata. Pertama, meningkatkan keterlibatan, prakarsa, dan kecerdikan masyarakat dalam pembangunan, serta

\* CORRESPONDING AUTHOR. Email: [bambangsupeno@unilak.ac.id](mailto:bambangsupeno@unilak.ac.id)

meningkatkan upaya berbagi hasil pembangunan secara adil di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan bakat lokal. Kedua, mengubah cara pengambilan keputusan dilakukan untuk mengalokasikan sumber daya yang berguna dengan lebih baik publik ke pemerintahan di tingkat daerah. Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan di wilayahnya. Dalam konteks desentralisasi, penting bagi pemerintah daerah untuk bersikap responsif dalam merencanakan pembangunan wilayah sesuai dengan kebutuhan penduduk. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi Persentase kemiskinan lokal (Jolianis, 2016).

Di era Covid 19, kemiskinan menjadi masalah di seluruh Indonesia, termasuk 12 kabupaten dan kota di Provinsi Riau yang mana tingkat kemiskinan tersebut meningkat pesat di berbagai daerah di Indonesia. Akan tetapi kemiskinan tersebut ternyata dapat diminimalisir karena Riau termasuk “daerah kaya” sumber daya alam terutama hasil migasnya. Hasil migas tersebut dapat mensejahterakan masyarakat. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional, yang dirilis BPS Provinsi Riau pada Mei 2021, menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin pada 12 daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau cenderung menurun, lihat Tabel 1.1. Hal tersebut cukup membuat menarik dimana wabah virus Covid-19 yang membuat ekonomi nasional menurun, ternyata Provinsi Riau justru penduduk miskinnya setiap tahun terus menurun dan tetap bertahan di masa pandemic covid 19.

Hampir setiap tahun jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau mengalami kecenderungan menurun, Hal ini mencerminkan bahwa pemerintah provinsi Riau mampu menurunkan tingkat kemiskinan pada masa pandemi covid 19 dengan pengelolaan ekonomi yang baik. Namun, masih ada peluang persentase kemiskinan di 12 kota dan kabupaten di Provinsi Riau naik. Wilayah Kabupaten Rokan Hulu di Provinsi Riau memiliki tingkat kemiskinan tertinggi; selama lima tahun terakhir, rata-rata 70,90 ribu orang atau 14,17% hidup dalam kemiskinan. Hal ini karena warga Kabupaten Rokan Hulu ada yang benar-benar tidak memiliki mata pencaharian, memiliki mata pencaharian yang tidak tetap, dan lain sebagainya. Hal lainnya yaitu terjadi disebabkan factor infrastruktur yang kurang memadai maka diupayakan ditangani dalam program yang serius, seperti melakukan program pemberdayaan masyarakat, raskin, membangun rumah layak huni dan lain sebagainya.

Ketidakmampuan penduduk untuk memenuhi kebutuhan fundamental mereka merupakan isu yang secara intrinsik terkait dengan masalah kemiskinan. Kemiskinan merujuk pada situasi di mana seseorang atau kelompok hidup dengan standar kehidupan yang rendah bertentangan dengan norma normatif masyarakat. Dari segi ekonomi, kemiskinan juga dapat dicirikan sebagai kurangnya sarana yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan suatu populasi (Yasa, 2010).

Sebelum menganalisis kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi kemiskinan, perlu memperhatikan faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan atau yang dalam analisis kemiskinan dikenal sebagai determinan kemiskinan (Nopirin, 2011). Menurut Kuncoro (2013), ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi perekonomian suatu negara, namun salah satu yang terpenting adalah kebijakan pemerintah itu sendiri. Untuk mencapai pembangunan ekonomi, strategi pemerintah ini harus diakui dan didefinisikan dengan benar dan berdampak pada penurunan jumlah kemiskinan.

Perekonomian suatu negara dapat diprediksi dengan melihat garis waktu pertumbuhannya Produk Domestik Bruto Daerah (PDRB). PDRB dapat mencirikan kapasitas suatu daerah untuk menggunakan sumber dayanya sebagai salah satu penanda kunci untuk memastikan keadaan ekonomi di daerah tersebut selama jangka waktu tertentu. Selain, secara keseluruhan keadaan ekonomi masing-masing daerah Dalam melihat kondisi keuangan suatu wilayah, indikator adalah melihat beberapa anggaran belanja daerah terbesar di daerah tersebut. Bantuan Pemerintah untuk perekonomian daerah berbentuk belanja daerah; Oleh karena itu, semakin besar APBD yang diotorisasi untuk pertumbuhan, semakin besar pula rangsangan yang diberikan kepada perekonomian daerah tersebut. besar kemungkinan terjadinya kerusuhan sipil. Hal ini menunjukkan bahwa iklim ekonomi di wilayah yang bersangkutan akan membaik, yang pada akhirnya akan memungkinkan untuk menstabilkan dan menurunkan tingkat kemiskinan di wilayah tersebut (Nopirin, 2011).

Pertumbuhan ekonomi daerah pada 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau yang tercermin dari nilai PDRB selama tahun 2016 - 2020 seluruhnya mengalami penurunan, pembangunan secara umum pada 12 daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau selama 5 tahun terakhir hanya sebesar 29,03 %. Bahkan Kabupaten Bengkalis mengalami pertumbuhan ekonominya minus, hal ini tentu menjadi pertanyaan besar bagaimana mungkin Kabupaten Bengkalis yang merupakan daerah kaya akan sumber daya alam terutama migas tetapi mengalami pertumbuhan ekonomi yang minus, bahkan seperti diketahui Kabupaten Bengkalis adalah Kabupaten dengan pendapatan daerah tertinggi nomor dua terbesar di Indonesia setelah Kabupaten Kutai Kartanegara tetapi mengalami pertumbuhan ekonomi yang minus, hal ini tentunya harus menjadi perhatian serius dari semua pihak terutama "Pemerintah Daerahnya". Jika dibandingkan dengan Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Indonesia per kabupaten/kota pada periode yang sama dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 5,44%. Hal ini jelas sangat memprihatinkan karena 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau pertumbuhan ekonominya sangat jauh tertinggal dari pertumbuhan ekonomi secara nasional, dan ini tentunya harus menjadi pekerjaan besar baik bagi pemerintah pusat, provinsi terlebih bagi pemerintah daerahnya sendiri untuk mengejar ketertinggalan tersebut.

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan PDRB. Menurut Nasution (2010), faktor-faktor berikut berkontribusi terhadap kinerja PDRB di wilayah tertentu di suatu Kabupaten atau PAD, DAU, DBH, BM, Inflasi, PMA, dan Penanaman Modal Dalam Negeri adalah beberapa isu yang menjadi fokus kota-kota di Indonesia (PMDN).

Menurut Pasal 5 ayat (2) UU No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Daerah didapatkan beberapa sumber, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan pendapatan daerah sah lainnya. Salah satu sumber pendanaan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Bagian laba BUMD, dan pendapatan daerah sah lainnya (Pasal 6 ayat (1) UU No. 33 Tahun 2004). Sumber pendanaan lainnya adalah Dana Perimbangan berupa transfer dari pusat terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) (Pasal 10) (1) UU No. 33 Tahun 2004).

Yang dimaksud dengan "Pendapatan Asli Daerah" (PAD) adalah pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan daerah yang mengatur tentang distribusi

barang dan jasa. Jika indeks PAD (Pendapatan Asli Daerah) naik ke tingkat yang tinggi, ekonomi lokal kemungkinan akan mengalami pertumbuhan.

Keuangan Daerah dan Dana Perimbangan, yang akan digunakan untuk memodifikasi Daerah Belanja, adalah satu-satunya komponen yang telah diidentifikasi dan merupakan variabel yang signifikan dalam konteks diskusi yang sedang berlangsung tentang sifat konjungtif. temuan Brata (2008) bahwa terdapat dua komponen pembangunan ekonomi daerah yang berpengaruh positif dan signifikan secara statistik. Dua komponen yang dimaksud adalah PAD dan Dana Perimbangan. Tingkat investasi yang lebih tinggi diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan sektor publik dan, pada gilirannya, meningkatkan partisipasi publik dalam proyek-proyek yang dipengaruhi oleh standar PAD. Dengan demikian ketersediaan anggaran yang bersumber dari PAD dan Dana Perimbangan untuk Belanja Daerah mempunyai peranan strategis dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Jumlah belanja modal (BM) dari tahun 2016 - 2020 sebesar 25.143.331.706 dan lebih besar dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini menunjukkan bahwa 12 Kabupaten/Daerah di Provinsi Riau sangat bergantung pada Dana Transfer dari pusat untuk menjalankan kebutuhan operasionalnya. Oleh karena itu, kemampuan keuangan di 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau akan sangat dipengaruhi oleh keberhasilan mereka dalam menyediakan dan memberikan pelayanan publik.

Kemudian PAD 12 daerah Kabupaten di Provinsi Riau jumlah pada tahun 2016 - 2020 sebesar 14.481.397.042 dan peningkatan tersebut masih mungkin untuk ditingkatkan, melihat potensi yang bisa dikembangkan pada 12 daerah Kota di Provinsi Riau yang cukup besar terutama kekayaan Sumber Daya Alamnya, namun sayangnya peningkatan PAD tersebut tidak diikuti dengan PDRB.

Jika dihubungkan dengan Tabel 1.2 diatas terlihat bahwa kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ternyata tidak diikuti dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi serta tingginya belanja modal (BM) pada 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau yang tercermin dari turunnya PDRB. Lagi-lagi disini timbul pertanyaan bagaimana sebenarnya pemerintah 12 daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD), terhadap Belanja Daerahnya dalam kebijakan pembangunan daerah demi kesejahteraan rakyat. Muncul pertanyaan apakah alokasi anggaran yang kurang tepat menjadi penyebab perlambatan dan bahkan Pembangunan ekonomi mengalami penurunan di 12 kota dan kabupaten di Provinsi Riau. Dalam hal ini, perlu dipertimbangkan pengaruh Kekayaan Awal Daerah (PAD) terhadap kesejahteraan masyarakat, pembangunan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan. Belanja Daerah konon merupakan salah satu komponen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) bersama dengan konsumsi masyarakat, investasi dan net ekspor. Sebagai bentuk intervensi pemerintah dalam perekonomian untuk mengatasi kegagalan pasar (market failure), kebijakan fiskal dapat dilakukan melalui pengeluaran Pemerintah Daerah dalam APBD melalui Belanja Modal (Kuncoro, 2013).

Dalam pemerintahan daerah, seringkali terjadi fenomena dimana pertumbuhan ekonomi meningkat namun Belanja Modal tidak mengikuti peningkatan tersebut, terlihat dari jumlah Belanja Modal yang relatif kecil (Kuncoro, 2013). Untuk terus menggenjot aset, Pemerintah Daerah mengalokasikan dana berupa APBD. Persyaratan infrastruktur dan fasilitas untuk operasi pemerintah dan bangunan publik di wilayah tersebut menjadi landasan Alokasi Belanja

Modal ini. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus terus menerus mengubah komposisi belanja untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Saat ini, terjadi penyalahgunaan belanja daerah, yang terutama digunakan untuk tugas-tugas duniawi yang sia-sia. Menurut Sarangih (2012), belanja daerah harus dimanfaatkan secara bermanfaat seperti pertumbuhan yang membantu masyarakat secara keseluruhan.

Agar masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan daerah, maka belanja modal dimasukkan ke dalam belanja daerah pemerintah daerah, khususnya pemeliharaan serta peningkatan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, dan infrastruktur. Sebaliknya, PP. No. 71 Tahun 2010 menetapkan bahwa Beban Modal adalah instrumen pembelian aktiva tetap berdasarkan kurs mata uang dan aktiva lain yang memperoleh keuntungan dari perhitungan berganda. Pembangunan gedung, struktur lain, serta pembelian mesin dan aset yang tidak dapat diandalkan, semuanya termasuk dalam belanja modal. Oleh karena itu, diharapkan bahwa infrastruktur yang unggul akan dapat mendorong produktivitas dan keberhasilan di berbagai sektor. Hal ini juga diantisipasi bahwa peningkatan produktivitas masyarakat dan, pada akhirnya, peningkatan pertumbuhan ekonomi akan dihasilkan dari hal ini.

Sebaliknya, menurut Todaro dalam Sasana (2011), Ada tiga elemen yang mempengaruhi ekspansi ekonomi setiap negara: perluasan modal, pertumbuhan penduduk, dan kemajuan teknologi. Akumulasi modal dalam hal ini sangat berkaitan dengan investasi. Kemajuan suatu daerah dapat dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi secara terus menerus, dengan faktor terpenting adalah investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Untuk meningkatkan investasi, tingkat ekonomi lokal juga harus meningkat. Indikator investasi daerah yang paling penting adalah tingginya Belanja Modal dalam APBD. Alokasi Belanja Modal di Pemerintah Daerah juga dipengaruhi oleh aktif atau tidaknya penyerapan tenaga kerja pemerintah daerah. Akibatnya, ada keterkaitan antara ideologi Belanja Modal dengan ekonomi lokal secara keseluruhan.

Nurmainah (2013) mengutip Todaro yang menjelaskan bahwa amplifikasi modal terjadi ketika sebagian keuntungan dikelola dan diinvestasikan kembali untuk meningkatkan produksi dan keuntungan di masa depan. Menurut Sasana (2011), Pemerintah Daerah melakukan investasi dengan memberikan sumber daya untuk berbagai inisiatif pembangunan dengan tujuan membangun infrastruktur dan fasilitas umum. Pengeluaran tersebut tercantum dalam Pengeluaran Konstruksi Dewan Regional. Namun, dalam praktiknya, Belanja Modal cenderung memiliki porsi yang lebih kecil dibandingkan Belanja Pegawai, padahal Belanja Modal termasuk ke dalam Belanja Langsung yang manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat (Sasana, 2011). Tabel 1.3 menunjukkan besarnya alokasi Belanja Modal pada 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau selama 5 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2016 hingga 2020.

Belanja Modal yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah pada 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dari Belanja Daerah ternyata besarnya yaitu 25.143.331.706. Hal ini jelas menunjukkan bahwa Belanja Daerah lebih banyak dialokasikan untuk hal-hal yang tidak produktif yang tidak dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, padahal seharusnya Belanja Modal harus diupayakan setiap tahunnya naik lebih besar guna meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah (Sasana, 2011).

Dalam melakukan penelitian ini tidak terlepas dari penelitian-penelitian terdahulu tentang pengaruh PAD, dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Tingkat Kemiskinan yang sebelumnya sudah pernah dilakukan. Akan tetapi dari beberapa penelitian terdahulu tersebut peneliti masih menemukan adanya reset gap terhadap hasil penelitiannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni (2020), Irvan dan Karmini (2016), Edy dan Marhamah (2016), yang sampai pada kesimpulan bahwa PAD secara signifikan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. menurut Nisa (2017) serta Wayan dan Suputra (2017) PAD berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Paat dkk (2017), Budi Santoso (2013), yang menyimpulkan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Fatimah dan Priyono Nuwun (2020) Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan sedangkan Andyka (2015), hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa PAD tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kemiskinan. Hal ini berbeda dengan Meilen (2014) melakukan penelitian yang sampai pada kesimpulan bahwa PAD berdampak pada penurunan angka kemiskinan. Sedangkan Putrayuda dkk, (2017) dan Paat dkk (2017) menunjukkan bahwa PAD secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Dewi dan Suputra (2017) mengatakan Ekspansi ekonomi tidak dipengaruhi oleh belanja modal. Irvan & Karmini (2016) mengatakan Belanja Modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Serta penelitian Santi (2013), yang sampai pada kesimpulan bahwa belanja modal berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi daerah.

Penelitian Putrayuda dkk (2017) Pertumbuhan Ekonomi (PE) berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fatimah dan Priyono (2020), Paat dkk (2017) serta Sri Kuncoro (2014), hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan. Hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Fransiska (2013), yang menyimpulkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak mempengaruhi terhadap Tingkat Kemiskinan.

Berdasarkan adanya reset gap dari penelitian terdahulu tersebut dan adanya fenomena yang terjadi yaitu peningkatan PAD yang diterima oleh 12 daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau setiap tahunnya tetapi hal tersebut tidak diikuti dengan kenaikan Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) serta adanya peningkatan Tingkat Kemiskinan yang terus menerus setiap tahun hal ini membuat peneliti tertarik dan termotivasi kembali untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari beberapa penelitian lain yang telah diselesaikan sebelumnya. Namun demikian, terdapat beberapa perbedaan di antara ketiganya sebagai berikut: (1) Penelitian dilakukan di 12 kabupaten di Provinsi Riau, tujuan penelitian, dimulai karena menurut temuan awal penelitian, Pertumbuhan Ekonomi hadir di distrik-distrik ini dengan indikator PDRB mengalami fluktuasi bahkan minus begitu juga terhadap PAD dan Belanja Modal mengalami fluktuasi pula berbanding terbalik terhadap persentase total penduduk

miskin yang condong menurun dengan demikian, akan menarik untuk membahas bagaimana situasi aktual dan beberapa keuntungan utama dari kedua variabel ini dapat mempengaruhi indikator moneter dan kinematik. (2) Dalam penelitian ini peneliti menggabungkan seluruh variabel dari beberapa penelitian terdahulu yaitu PAD, Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan (3) Periode pengamatan, dimana periode pengamatan yang digunakan pada penelitian ini, lebih up to date yaitu selama lima tahun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

## Tinjauan Pustaka

### Teori Keagenan

Menurut teori keagenan, hubungan antara prinsipal dan agen dapat dijelaskan sebagai sebuah kontrak dimana prinsipal memberikan kuasa kepada agen untuk mengambil keputusan atas nama prinsipal (Jensen dan Meckling, 1997 dalam Yovita, 2011). Namun, karena terdapat perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal, maka ada kemungkinan agen tidak selalu bertindak dalam kepentingan terbaik bagi prinsipal.

Kekuasaan dan tugas agen dan pemimpin disepakati bersama dalam suatu kontrak kerja, dimana prinsipnya melimpahkan wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Pada kenyataannya, karena tujuan pribadi agen bertentangan dengan tujuan prinsipal, kekuasaan diberikan oleh prinsipal kepada agen seringkali menimbulkan masalah. Dengan kekuasaan tersebut, manajemen hanya dapat bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri, tanpa menghiraukan kepentingan pemilik. Ketimpangan informasi dihasilkan dari variasi pengetahuan yang dimiliki masing-masing pihak (informasi asimetris). Menurut Bangun dalam Yovita (2011), Agen memiliki pengetahuan paling banyak yang tersedia bagi mereka gunakan agar mendorong mereka bertindak dengan cara yang akan mengoptimalkan kegunaannya. Direktur akan merasa sulit untuk berhasil mengawasi kegiatan manajemen karena mereka memiliki pengetahuan yang terbatas.

Akar teori keagenan ditemukan dalam teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi, yang menggambarkan kemitraan antara pemimpin dan agen. Kesepakatan yang mengikat antara dua atau lebih orang, kelompok, atau perusahaan dikaji dengan teori keagenan. Kontrak dibuat antara primer dan agen, baik secara tegas maupun diam-diam, dengan maksud agar keinginan pemilik akan dilakukan oleh agen. Direktur akan merasa sulit untuk berhasil mengawasi kegiatan manajemen karena mereka memiliki pengetahuan yang terbatas.

Eksekutif dan legislatif memiliki hubungan keagenan, di mana eksekutif bertindak sebagai agen dan legislatif sebagai prinsipal. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, masalah keagenan selalu muncul dalam hubungan antara prinsipal dan agen. masalah terjadi antara eksekutif dan legislatif juga dapat dianggap sebagai masalah keagenan. Mohon dibuatkan parafase agar tidak terjadi plagiarisme.

Untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, prinsipal memberikan delegasi wewenang kepada agen yang bertindak atas nama prinsipal. Ketika datang untuk membuat kebijakan baru, legislatif berfungsi sebagai tuan yang mendelegasikan kekuasaan kepada pelayan seperti cabang eksekutif atau dewan legislatif. Dalam hal ini, hubungan keagenan dimulai ketika agen mengusulkan suatu kebijakan dan diakhiri ketika penyelia menerima atau menolak rencana tersebut.

### *Tingkat Kemiskinan*

Arti dari kemiskinan sebagaimana beralih ke dalam definisi kemiskinan telah melibatkan pemahaman pada level multidimensional, yaitu kemiskinan berkaitan langsung dengan berbagai dimensi kebutuhan manusia. Ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum yang sesuai dengan tingkat kelayakan hidup dalam hal ini disamakan dengan kemiskinan.

Kemiskinan didefinisikan sebagai standar hidup yang rendah, yakni suatu tingkat kurangnya materi dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Secara ekonomis, kemiskinan juga dapat diartikan sebagai keterbatasan sumberdaya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang (Yasir, 2010).

Kemiskinan merujuk pada kondisi di mana individu atau keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka, baik dalam konteks lingkungan sosial maupun ekonomi, yang tidak memberikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan mereka secara berkelanjutan keluar dari situasi tersebut.

### *Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Regional*

Pembangunan ekonomi dalam sebuah daerah adalah proses yang dimulai dari pemerintah daerah dan masyarakat setempat dalam mengelola sumber-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut (Alrsyad, 2010).

Pembangunan daerah memiliki peran utama dalam penekanan kebijakan pembangunan yang menekankan pada kesejahteraan daerah melalui pemanfaatan potensi sumber daya manusia, lembaga, dan sumber daya fisik secara lokal. Pendekatan ini memperkuat inisiatif dari pemerintah dalam proses pembangunan dengan tujuan menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah daerah dan masyarakat harus mengidentifikasi potensi yang ada di daerah mereka sebagai sumber daya untuk menggerakkan perekonomian daerah.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses yang melibatkan berbagai aspek, seperti pembentukan institusi baru, pengembangan industri alternatif, peningkatan kemampuan tenaga kerja untuk menghasilkan produk yang lebih baik, pengidentifikasian pasar baru, dan transformasi pengetahuan.

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat diukur dari peningkatan pendapatan total yang terjadi di wilayah tersebut, yang mencakup peningkatan nilai tambah yang dihasilkan. Hal ini dibandingkan antara periode waktu yang berbeda dalam perhitungan pendapatan wilayah harus dilakukan dalam harga konstan, bukan harga berlaku. Pendapatan wilayah mencerminkan penerimaan yang diterima oleh faktor produksi di wilayah tersebut, seperti tanah, modal, tenaga kerja, dan teknologi, yang selalu mencerminkan tingkat kemampuan wilayah tersebut. Selain itu, transfer pendapatan, yaitu pendapatan yang keluar dari wilayah selalu yang diterima dari luar wilayah, juga mempengaruhi tingkat kemampuan wilayah.

Pertumbuhan ekonomi dalam sebuah wilayah dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, serta faktor sosial dan politik. Faktor internal meliputi distribusi faktor produksi seperti tanah,

tenaga kerja, dan modal, sedangkan faktor eksternal melibatkan permintaan dari wilayah lain terhadap produk yang dihasilkan di wilayah tersebut. Wilayah dapat dibedakan menjadi wilayah homogen, wilayah administratif, dan wilayah nodal.

Perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi di setiap daerah dapat menyebabkan ketimpangan yang selalu terjadi dalam hal ekonomi dan pendapatan antar daerah. Pertumbuhan dan perkembangan daerah akan bergerak ke arah perbedaan yang semakin besar.

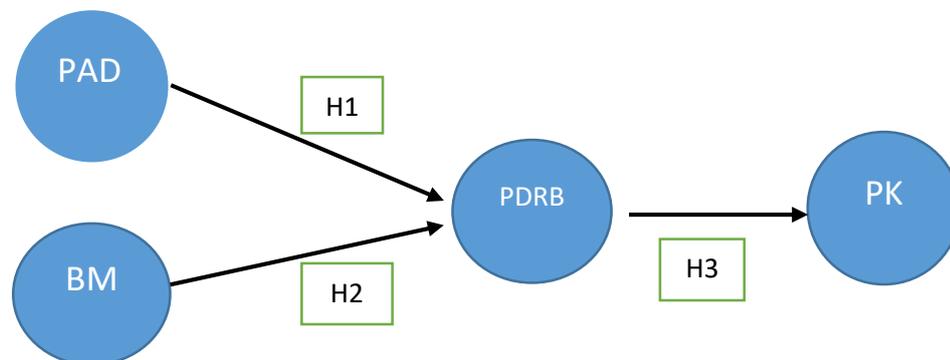
### *Pendapatan Asli Daerah (PAD)*

Pendapatan asli daerah merujuk pada penghasilan yang diperoleh oleh suatu daerah dari sumber daya di wilayahnya sendiri, yang dikumpulkan sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku dan sejalan dengan aturan hukum.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi faktor penting dalam pembiayaan kegiatan pemerintah daerah. Semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat. Selain itu, PAD juga merupakan salah satu sumber pendapatan keuangan negara, bersama dengan dana perimbangan, pinjaman daerah, dan penerimaan lainnya. Meskipun PAD tidak seluruhnya dapat membiayai APBD, keseluruhan penerimaan tersebut tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahunnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari berbagai sumber penerimaan, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lainnya. Menurut Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Bukan Pajak. Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan di wilayah tersebut.

### *Kerangka Penelitian*



Gambar 1. Kerangka Penelitian

### *Metode*

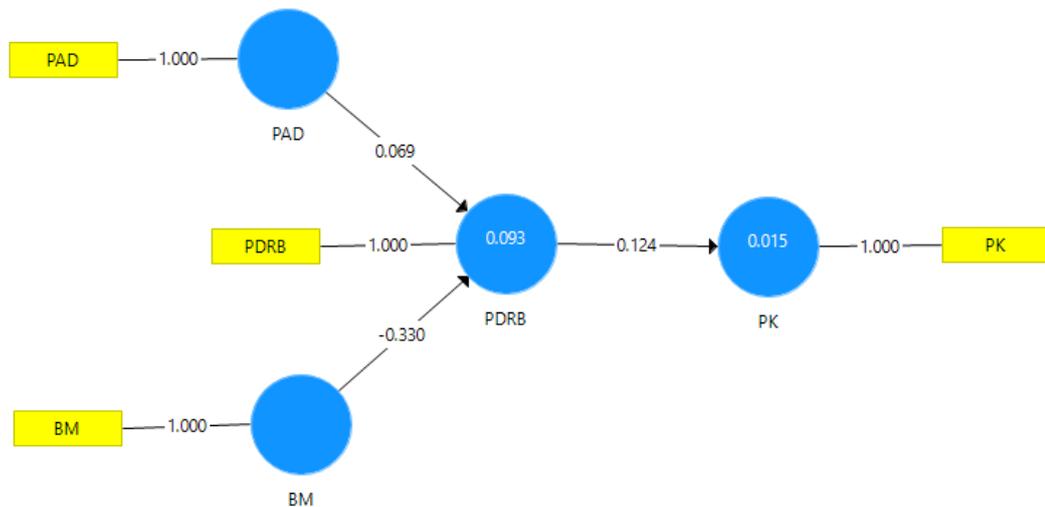
#### *Descriptive dan Explanatory Survey*

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode kuantitatif karena hasil pengamatan dikonversikan ke dalam angka-angka yang akan dianalisis menggunakan statistik. Penelitian

kualitatif mengharuskan peneliti menjelaskan variabel mempengaruhi variabel lain (Creswell, 2012). Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena empiris yang disertai data statistik, karakteristik dan pola hubungan antar variabel. Berdasarkan permasalahan yang diteliti, penelitian ini digolongkan kepada bentuk penelitian kausal asimetris, yakni penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat sehingga sifat penelitian ini adalah deskriptif eksplanatori).

## Hasil dan Pembahasan

### Analisis PLS



Gambar 2. Hasil Penelitian

Dalam PLS pengujian secara statistik setiap hubungan yang dihipotesiskan dilakukan dengan menggunakan simulasi. Dalam hal ini dilakukan metode *bootstrap* terhadap sampel. Pengujian dengan *bootstrap* juga dimaksudkan untuk meminimalkan masalah ketidaknormalan data penelitian. Hasil pengujian dengan *bootstrapping* dari analisis PLS adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Pengujian Signifikansi

Eksogen	Endogen	Path Coefficient	P Value
BM	PDRB	-0.330	0.014
PAD	PDRB	0.069	0.371
PRDM	PK	0.124	0.165

Catatan. Data Olahan 2023

Nilai koefisien jalur Biaya Modal (BM) terhadap Produk domestik regional bruto (PDRB) adalah -0.330 (kolom original sample), yakni bernilai negatif, yang berarti Biaya Modal (BM) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB). Diketahui nilai P-Values adalah  $0,014 < 0,05$ , artinya Biaya Modal (BM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB).

Nilai koefisien jalur Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB) adalah 0,069 (kolom original sample), yakni bernilai positif, yang berarti Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB). Diketahui nilai P-Values adalah  $0,371 > 0,05$ , maka disimpulkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB).

Nilai koefisien jalur pertumbuhan ekonomi (PDRB) terhadap tingkat kemiskinan adalah 0.124 (kolom original sample), yakni bernilai positif, yang berarti pertumbuhan ekonomi (PDRB) berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan (PK). Diketahui nilai P-Values adalah  $0,165 > 0,05$ , maka disimpulkan pertumbuhan ekonomi (PDRB) berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan (PK).

### *Pembahasan*

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Belanja Modal (BM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Belanja modal adalah pengeluaran yang digunakan untuk membeli atau membangun aset-aset yang akan digunakan dalam jangka waktu yang panjang, seperti bangunan, peralatan, dan infrastruktur. Belanja modal daerah adalah belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membangun atau memperbaiki aset-aset di wilayah yang dipimpinya.

Belanja modal daerah dapat berpengaruh terhadap Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) karena belanja modal merupakan salah satu komponen dari pertumbuhan ekonomi. PDRB diukur dengan menggunakan nilai total produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh sebuah wilayah dalam periode waktu tertentu. Belanja modal daerah dapat membantu meningkatkan produktivitas perusahaan dan meningkatkan kapasitas produksi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan PDRB.

Belanja modal daerah juga dapat membantu meningkatkan kualitas layanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Sebagai contoh, jika pemerintah daerah mengeluarkan belanja modal untuk membangun atau memperbaiki infrastruktur jalan dan transportasi, ini dapat meningkatkan akses masyarakat ke pasar dan meningkatkan efisiensi produksi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan PDRB.

Salah satu alasan mengapa pembangunan infrastruktur dapat memiliki dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi adalah karena biaya yang tinggi dan waktu yang lama yang diperlukan untuk membangunnya. Ini dapat mengurangi tingkat investasi di sektor lain yang mungkin lebih menguntungkan, serta mengalihkan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk investasi di sektor lain ke sektor infrastruktur. Infrastruktur yang tidak terawat atau tidak berfungsi dengan baik dapat memiliki dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat terjadi karena infrastruktur yang tidak terawat atau tidak berfungsi dengan baik dapat mengurangi produktivitas dan efisiensi, serta meningkatkan biaya produksi untuk perusahaan-perusahaan yang menggunakannya.

Bangunan yang sering tidak digunakan oleh pemerintah dapat menjadi masalah bagi pertumbuhan ekonomi, terutama jika bangunan tersebut merupakan aset yang berharga yang dapat digunakan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Jika bangunan tersebut tidak digunakan dengan efektif, maka dapat menjadi beban finansial bagi pemerintah, karena

pemerintah harus membayar biaya pemeliharaan dan perawatannya. Selain itu, bangunan yang tidak digunakan dapat mengalihkan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk investasi di sektor lain ke sektor pemeliharaan bangunan.

Pembangunan gedung dan bangunan memiliki dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi adalah karena biaya yang tinggi yang diperlukan untuk membangunnya, apalagi bangunan tersebut tidak digunakan lagi seperti pasar, halte, sekolah, rumah sakit yang sudah tua dan lain sebagainya. Ini dapat mengurangi tingkat investasi di sektor lain yang mungkin lebih menguntungkan, serta mengalihkan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk investasi di sektor lain ke sektor pembangunan gedung dan bangunan. Selain itu, pembangunan gedung dan bangunan dapat menyebabkan masalah lingkungan, seperti kerusakan lingkungan atau pencemaran, yang dapat mengurangi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah dapat mempertimbangkan berbagai solusi, seperti menjual atau menyewakan bangunan tersebut kepada perusahaan atau individu yang dapat memanfaatkannya dengan lebih efektif, atau mengubahnya menjadi aset yang dapat digunakan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi lainnya. Namun, perlu diingat bahwa solusi tersebut harus dipikirkan dengan hati-hati, karena dapat memiliki dampak yang tidak terduga tergantung pada bagaimana dan di mana bangunan tersebut digunakan.

Contoh lain infrastruktur yaitu, jika jalan raya tidak terawat dengan baik, maka truk-truk yang menggunakannya akan mengalami kerusakan lebih cepat dan membutuhkan perbaikan yang lebih sering, yang dapat meningkatkan biaya produksi bagi perusahaan yang menggunakan truk tersebut. Selain itu, infrastruktur yang tidak terawat atau tidak berfungsi dengan baik dapat menyebabkan masalah keamanan, seperti kecelakaan lalu lintas, yang dapat mengurangi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk mempertahankan infrastruktur agar tetap berfungsi dengan baik dan terawat dengan baik, agar tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara negatif.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Dewi dan Suputra (2017) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif & signifikan hubungan antara Biaya Modal (BM) dan pertumbuhan ekonomi.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan Ekonomi. Semakin tinggi PAD suatu daerah, maka tingkat ketergantungan fiskal daerah tersebut kepada pemerintah pusat semakin berkurang, sehingga daerah lebih leluasa dan fleksibel dalam merencanakan alokasi anggaran sesuai dengan agenda ekonominya. Pendapatan asli daerah adalah sumber pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari sumber-sumber yang berasal dari wilayah yang dipimpinya. Pendapatan asli daerah dapat berupa pajak, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan menggunakan nilai total produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh sebuah wilayah dalam periode waktu tertentu. PDRB dapat dihitung dengan menggunakan metode produksi atau metode pendapatan.

Meskipun pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting bagi pemerintah daerah, ia tidak langsung berpengaruh terhadap PDRB. Hal ini karena pendapatan asli daerah merupakan bagian dari pendapatan pemerintah daerah, bukan bagian dari produksi

barang dan jasa yang dihitung dalam PDRB. Sebagai contoh, jika pemerintah daerah meningkatkan pendapatan asli daerah dengan menaikkan tarif pajak atau retribusi, ini tidak akan secara langsung meningkatkan produksi barang dan jasa di wilayah tersebut.

Namun, pendapatan asli daerah dapat membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Sebagai contoh, jika pemerintah daerah menggunakan pendapatan asli daerah untuk memperbaiki infrastruktur jalan dan transportasi, ini dapat meningkatkan akses masyarakat ke pasar dan meningkatkan efisiensi produksi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan PDRB. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Nisa (2017) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif namun tidak signifikan hubungan antara pendapatan asli daerah (PAD) dan pertumbuhan ekonomi.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan menggunakan nilai total produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh sebuah wilayah dalam periode waktu tertentu. PDRB merupakan indikator yang berguna untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, tetapi ia tidak secara langsung mengukur tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan adalah persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, yaitu tingkat pendapatan yang dianggap cukup rendah untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, sandang, dan tempat tinggal. Tingkat kemiskinan dapat diukur dengan menggunakan berbagai metode, termasuk pendekatan pendapatan, konsumsi, dan kekayaan.

Meskipun pertumbuhan ekonomi dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum, ia tidak secara langsung berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini karena pertumbuhan ekonomi tidak menjamin bahwa keuntungan yang dihasilkan akan tersebar secara merata ke seluruh masyarakat. Sebagai contoh, jika sebuah wilayah mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi, ini tidak berarti bahwa tingkat kemiskinan di wilayah tersebut akan langsung turun. Untuk menurunkan tingkat kemiskinan, diperlukan upaya yang terintegrasi dan terpadu, termasuk peningkatan akses terhadap peluang kerja dan pendidikan, peningkatan kualitas layanan publik, dan pemberian bantuan sosial kepada kelompok miskin.

## **Kesimpulan**

### **1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Nilai koefisien jalur Biaya Modal (BM) terhadap Produk domestik regional bruto (PDRB) adalah -0.330 yakni bernilai negatif, yang berarti Biaya Modal (BM) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB). nilai P-Values adalah  $0,014 < 0,05$ , artinya Biaya Modal (BM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB). Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Belanja Modal (BM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Belanja modal adalah pengeluaran yang digunakan untuk membeli atau membangun aset-aset yang akan digunakan dalam jangka waktu yang panjang, seperti bangunan, peralatan, dan infrastruktur. Belanja modal daerah adalah belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membangun atau memperbaiki aset-aset di wilayah yang dipimpinnya.

### **2. Belanja Modal berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Nilai koefisien jalur Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB) adalah 0,069 yakni bernilai positif, yang berarti Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB). nilai P-Values adalah  $0,371 > 0,05$ , maka disimpulkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB). Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan Ekonomi. semakin tinggi PAD suatu daerah, maka tingkat ketergantungan fiskal daerah tersebut kepada pemerintah pusat semakin berkurang, sehingga daerah lebih leluasa dan fleksibel dalam merencanakan alokasi anggaran sesuai dengan agenda ekonominya. Pendapatan asli daerah adalah sumber pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari sumber-sumber yang berasal dari wilayah yang dipimpinnya. Pendapatan asli daerah dapat berupa pajak, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan menggunakan nilai total produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh sebuah wilayah dalam periode waktu tertentu. PDRB dapat dihitung dengan menggunakan metode produksi atau metode pendapatan.

### 3. Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan

Nilai koefisien jalur pertumbuhan ekonomi (PDRB) terhadap tingkat kemiskinan adalah 0.124 yakni bernilai positif, yang berarti pertumbuhan ekonomi (PDRB) berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan (PK). nilai P-Values adalah  $0,165 > 0,05$ , maka disimpulkan pertumbuhan ekonomi (PDRB) berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan (PK). Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan menggunakan nilai total produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh sebuah wilayah dalam periode waktu tertentu. PDRB merupakan indikator yang berguna untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, tetapi ia tidak secara langsung mengukur tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan adalah persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, yaitu tingkat pendapatan yang dianggap cukup rendah untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, sandang, dan tempat tinggal. Tingkat kemiskinan dapat diukur dengan menggunakan berbagai metode, termasuk pendekatan pendapatan, konsumsi, dan kekayaan.

## Referensi

- Adi, Priyo, Hadi, 2012. Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali. *Jurnal Interdisipliner UKSW, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga.*
- Adit Agus P., 2010. Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan (Studi Kasus 35 kabupaten/Kota Di Jawa Tengah). *Jurnal Tesis, Tidak Dipublikasikan. Fakultas Ekonomi Undip. Semarang.*
- Andri, Devita, Arman Delis dan Junaidi, 2014. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten / Kota di Provinsi Jambi". *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Vol. 2, No. 2, Oktober-Desember.*
- Andyka, Arief dan Pratomo, 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan Belanja Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan DKI Jakarta. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Vol. 1, No. 1, April, Universitas Diponegoro, Semarang.*
- Anis Setiyawati dan Ardi Hamzah, 2007. Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan Belanja Pembangunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran: Pendekatan Analisis Jalur. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol. 4, No. 2, Hal. 211-228. Universitas Trunojoyo, Semarang.*

- Arius, Jonaidi, 2012. Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Di Indonesia, *Jurnal Kajian Ekonomi* Vol. 1, No. 1, April, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Agam.
- Arsyad, Lincolin. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi ke-7. STIE YKPN. Yogyakarta.
- Asepma Hygi Prihastuti, Taufeni Taufik, dan Restu Agusti, 2015. Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Riau. *Jurnal SOROT*, Vol. 10, No. 2, Oktober, Hal. 143 – 154, Fakultas Ekonomi, Universitas Riau.
- Badan Pusat Statistik, 2021. *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Riau*
- Badan Pusat Statistik, 2021. *Survei Sosial Ekonomi Nasional*, September.
- Bank Indonesia <http://www.bi.go.id/> Departemen Statistik Ekonomi dan Moneter
- BPKP, 2012. *Petunjuk Penyusunan Kompilasi Laporan Keuangan dan Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Revisi)*, Jakarta.
- Budi, Santoso, 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan Pada 33 Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Bisnis* Vol. 5, No. 2, Juli, Universitas Tri Sakti, Jakarta.
- Dewi Ni Wayan Ratna, dan Suputra I Dewa Gede Dharma, 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.18, No.3, Hal. 1745-1773
- Edy Susanto dan Marhamah, 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dengan Belanja Daerah Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada 29 Kabupaten dan 9 Kota Di Jawa Timur). *Jurnal STIE Semarang*, Vol. 8, No. 1, Edisi Februari (ISSN : 2252-826).
- Fatimah Ari Nurul, dan Priyono Nuwun, 2020. Kontribusi PAD, Dana Perimbangan, Belanja Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Jawa Tengah, *Journal of Applied Accounting and Finance*, Vol. 4, No. 2, Hal. 75-92
- Firza, Murdiansyah dan Ikhsan, 2016. Analisis Pembangunan Di Provinsi Aceh Pasca Pemberlakuan Dana Otsus, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM)* Vol. 1, No. 2, November 2016, Hal. 467-475. *Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah*.
- Fitriyanti Nur Ika, dan Handayani Herniwati Retno, 2020. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Khusus (Dak), Dan Belanja Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016), *Diponegoro Journal Of Economics*, Vol. 9, No. 2, Hal. 80-90
- Fransiska, Hastin, Wulandari, 2013, Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Pengangguran, dan Pendidikan Terhadap Kemiskinan Provinsi Di Indonesia Tahun 2008-2012. *Simposium Nasional Akuntansi X, Makassar*.
- Ghozali, Imam, 2021. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, Edisi Kesepuluh, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Harahap, A., 2010. Pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Sumber Daya Alam terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, Tesis (Tidak dipublikasikan), Universitas Sumatera Utara.
- Hariato David dan Adi Priyo, 2010. Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Perkapita. *Simposium Nasional Akuntansi X, Makassar*.
- Hendarmin, 2012. Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah dan Investasi Swasta terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat, *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang*.
- Irwan I Putu, dan Karmini Ni Luh, 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening, *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana* Vol.5, No.3, Hal. 338-362
- Ismail, 2013. *Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah*. UPP AMP YKPN. Jogjakarta.
- Jolianis, 2016. Analisis Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Kemiskinan Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening, *Journal of Economic and Economic Education*, Vol.4, No.2, Hal. 34-57, STKIP- PGRI Sumbar.
- Khubbil Abdillah dan Djoko Mursinto, 2016. The Effects of Financial Balance Transfer and Regional Own-Source Revenue on Regional Expenditure of Regencies and Municipalities in East Java Province. *Jurnal. Universitas Brawijaya Malang*.

- Kuncoro, Mudrajad, 2013. Otonomi dan Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang, Airlangga, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2010. Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi, Erlangga, Jakarta.
- Lestari, Ahmad, Ika Sasti and Hasni, 2016. Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Jumlah Tenaga Kerja dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Surakarta. Artikel Publikasi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Surakarta.
- Lukman, Hakim, 2013. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa dan Bali). Jurnal STIE Semarang, Vol. 8, No. 1, Edisi Februari (ISSN : 2252-826).
- Manik, 2009. Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK dan BelanjaPembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran, JurnalAkuntansi dan Keuangan Indonesia. Universitas Indonesia.
- Mawarni, Darwanis, danGuntur Hendriwiyanto, 2013. Derajat Desentralisasi Fiskal dan Tingkat Kemandirian KeuanganPada Era Otonomi Daerah Pemerintahan Kabupaten dan Kota di Provinsi JawaTimur, Disertasi, tidak dipublikasikan. Surabaya : Pascasarjana Unair.
- Meilen, Greri, Paseki, Amran. Naukoko, Patrick, Wauran, 2014. Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Belanja Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan Di Kota Manado Tahun 2004-2012. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol. 14 no. 3 - Oktober. Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Nahu, Daud, 2016. The Influence of Economic Growth on the Degree of Autonomy of the Regions and the Absorption of Labor and Social Welfare: Regencies and Cities of Maluku Province. International Journal of Economics and Finance. Vol. 8. No. 2. 2016 ISSN 1916-971XE-ISSN 1916-9728. Published by Canadian Center of Science and Education.
- Nasution, Hendry, Sulaiman, 2010. Analisis Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto era Desentralisasi Fiskal di Propinsi Banten Periode 2001-2009. Media Ekonomi. Vol.18, No.2, Agustus.
- Nisa Aulia Afafun, 2017. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur, Vol. 1, Jilid 2/2017 Hal. 203-214
- Nopirin, 2011. Perekonomian Indonesia, Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Nugroho, Agung, 2010, Strategi Jitu memilih Metode statistic Penelitian dengan SPSS. Andi. Jogjakarta.
- Nurmainah, 2013. Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap pengalokasianbelanja modal. Accounting Analysis Journal. Universitas Negeri Semarang.
- Paat Dewi Chrisanty, Rosalina A.M. Koleangan, Rumate Vekie A., 2017, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Dampaknya Terhadap Kemiskinan Di Kota Bitung, Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah, Vol. 18, No. 4, Hal 1-10
- Putrayuda T. Fahrurrizza, Efni Yulia, Kamaliah, 2017. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Dampaknya Pada Tingkat Kemiskinan Di Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2011-2015, Jurnal Teapak Manajemen Bisnis, Vol. 9, No. 3, Hal 198-224
- Riduawan & Kuncoro, 2010. Metode Kuantitatif : Teori Dan Aplikasi Untuk Bisnis Dan Ekonomi. Edisi Kelima. UUP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Santi, Nurmainah. 2013. Analisis Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah, Tenaga Kerja Terserap dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan konomi dan Kemiskina (Studi Kasus 35 Kabupaten / Kota Di Provinsi Jawa Tengah). Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE). September. Vol. 20, No. 2, Hal. 131 - 141, Universitas Diponegoro. Semarang.
- Saragih, Juli, Panglima, 2012. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Saragih, Juli, Panglima, 2008, Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sarwono,Jonathan. 2010. Analisis Jalur untuk Riset Bisnis dengan SPSS. Penerbit ANDI. Yogyakarta.
- Sasana, Putro, Nugroho, 2011. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus pada Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah). Diponegoro Jurnal Of Accounting, UNDIP, Semarang.
- Sholihin dan Ratmono, 2013 Statistik Penelitian dan Aplikasinya Dengan SPSS 10.0 For Windows. Alfa Beta. Bandung.
- Sianipar, Eva, Septriani, 2011. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Perimbangan Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara, Tesis (Tidak dipublikasikan), Universitas Sumatera Utara.

- Simanjuntak, 2010, Penduduk. Dalam Pengertian dan Definisi, Bina Grafika. Jakarta.
- Simanullang, S. P., 2013. Ekonomi Publik: Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah, BPFE, Unibraw, Malang.
- Sri, Kuncoro, 2014. Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran dan Pendidikan terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur tahun 2009-2011. Naskah Publikasi Karya Ilmiah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, 2021.
- Sugiyono, 2016. Metode Penelitian Bisnis, Alfabeta, Bandung.
- Suharto, 2009. Analisis Peran Sektor Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja (Studi Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Jawa Timur). Jurnal. Universitas Brawjaya Malang. ([http://www.policy.hu/suharto/modul a/makindo13.html](http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo13.html))
- Sukirno, Sadono, 2013. Ekonomi Pembangunan Proses Masalah dan Kebijaksanaan. Penerbit FE-UI dan Bina Grafika. Jakarta
- Syukriy Abdullah, 2013. Mekanisme dan Penggunaan Dana Alokasi Khusus. Jurnal Ekonomi STIE No. 2/Th. 13/25/ April-Juni : 90-109. Yogyakarta.
- Syukriy, Abdullah dan Abdul, Halim. 2009. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali. Jurnal Ekonomi STIE No. 2/Th. XIII/25/ April-Juni : 90-109. Yogyakarta.
- Tarigan, Robert. 2010. Dana Alokasi Umum Konsep, Hambatan, dan Prospek di Era Otonomi Daerah. Cetakan kedua. Penerbit Buku Kompas. Jakarta.
- Tri Hartitik, 2014. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus(DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009-2011 Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE). September. Vol. 2, No. 2, Hal. 13-41, Universitas Diponegoro. Semarang.
- Tri, Widodo, 2012. Perencanaan Pembangunan: Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah). UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Ulfi, Maryati dan Endrawati, 2010. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (OAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Sumatera Barat. Jurnal Akuntansi & Manajemen. Vol 5 No.2 Desember. Hal. 68-84, ISSN 1858-3687. Politeknik Negeri Padang.
- Wahyuni Anita Sri, 2020. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta, Jurnal Stei Ekonomi, Vol. 20, No. 20, Hal. 1-22
- Wahyuni dan Priyo 2009. Analisis Pertumbuhan Dan Kontribusi Dana Bagi Hasil Terhadap Pendapatan Daerah (Studi Pada Kabupaten/Kota Se Jawa-Bali), National Conference UKWMS, Surabaya
- Wandira, Widjaja, 2013. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Yasa Murjana, 2010. Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Daerah Sebagai Variabel Mediasi, Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang.
- Yolanda, 2014. Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemda: Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Jawa dan Bali. Jurnal Ekonomi STEI No. 2/Tahun 13/25.
- Yovita, Farah Marta, 2011. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi Se Indonesia Periode 2008-2010)". Diponegoro, Jurnal Of Accounting, UNDIP, Semarang.
- Yozi, Aulia, Rahman dan Ayunda, Lintang, Chamelia, 2015. Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi PDRB Kabupaten / Kota Jawa Tengah Tahun 2008-2012. Journal of Economics and Policy. Received : 21 November. Accepted: 15 Desember. Published: March. Universitas Negeri Semarang.
- Yulianis, 2016. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi Se Indonesia Periode 2008-2010), Diponegoro Jurnal Of Accounting, UNDIP, Semarang.
- Zuwesty, Eka, Putri, 2015. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Bisnis dan Manajemen. Vol. 5, No. 2, Oktober.